

Kajian Determinasi Angka Stunting

Yoni Setiawan¹, Maheni Ika Sari²

¹Desa Kencong, Program SDC, Kabupaten Jember 1; yonisetiawan76968@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember 2; maheni@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i1.2>

*Correspondensi: Maheni Ika Sari

Email: maheni@unmuhjember.ac.id

Published: Januari, 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk memetakan faktor-faktor yang mengiringi munculnya angka stunting. Jember menempati angka tertinggi kasus stunting di Jawa Timur. Studi ini berupaya memetakan peran posyandu dalam penanganan angka stunting di desa Kencong. Dari hasil analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif ditemukan bahwa posyandu merupakan garda terdepan dalam penanganan stunting di desa Kencong. Namun demikian perlu adanya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap posyandu agar lebih optimal dalam penanganan stunting.

Keywords: *stunting*, posyandu, kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Seribu hari pertama kehidupan manusia merupakan masa kritis yang harus menjadi perhatian utama karena menjadi tolok ukur perkembangan fisik, kecerdasan dan mental manusia. Masa yang disebut dengan masa emas balita ini harus terpenuhi kecukupan gizinya akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dari segi fisik, motorik, kemampuan kognitif dan mentalnya. Kegagalan tumbuh kembang di masa ini yang kemudian disebut dengan *stunting* ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada usia dewasa nanti (Sumarni, 2017). Demikian pula dengan kualitas kemampuan akademik juga ditentukan oleh 1000 hari pertumbuhan pertama tersebut (Hoang, Nghiem & Vu, 2019). Aryastami dan Tarigan (2017) menyatakan *stunting* memiliki risiko panjang yakni PTM pada usia dewasa, walaupun masih dapat dikoreksi pada usia dini. Upaya penurunan masalah gizi harus ditangani secara lintas sektoral di semua lini. Ibu dan calon pengantin harus dibekali dengan pengetahuan cukup tentang gizi dan kehamilan, ASI Eksklusif pada ibu bersalin yang sehat. Selanjutnya MPASI harus dipahami oleh para ibu dan tenaga kesehatan secara optimal. Di sisi lain Rahmadita (2020) menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menangani dan menurunkan prevalensi *stunting* yang dibahas melalui rapat terbatas tentang intervensi stunting yang diselenggarakan bersama ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2017, bahwa pada rapat tersebut membahas tentang perlunya memperkuat koordinasi dan memperluas cakupan program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk memperbaiki kualitas program guna menurunkan angka *stunting* di setiap wilayah yang sudah masuk ke dalam desa prioritas.

Sementara itu kasus stunting ini sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh desa adalah Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. Pembangunan menjadi kewenangan desa baik pembangunan fisik atau non fisik. Arah kebijakan pembangunan desa adalah SDGs Desa yang merupakan upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada pasal 7 disebutkan bahwa salah satu tujuan SDGs adalah mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Dana Desa Tahun 2022 yang diberikan pada Pemerintah Desa untuk kegiatan Program Prioritas Nasional adalah untuk pencegahan stunting. Pada tahun 2020 program pencegahan konvergensi *stunting* sudah menjadi agenda Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk peningkatan pelayanan publik dibidang Kesehatan Desa yaitu untuk pencegahan perbaikan kekurangan gizi kronis/*stunting*.

Stunting meningkat karena multifaktor bukan hanya karena dari sisi kekurangan gizi, kesehatan ibu saat hamil ataupun pemberian MPASI yang tidak memenuhi standar gizi. Angka stunting muncul nampaknya juga muncul beriringan dengan faktor kemiskinan yang artinya masalah stunting juga muncul karena kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di sini bukan sekedar secara personal namun perekonomian secara makro yang disinyalir berkaitan erat dengan ketersediaan pangan pada keluarga. Kemiskinan dibuktikan seringkali hadir bersamaan dengan terjadinya stunting pada balita (Vonaesch et al., 2017; Sano, Routh and Lanigan, 2019). Studi ini mengkaji apakah angka stunting di desa Kencong berhubungan ketersediaan layanan posyandu. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran penyebab tingginya angka stunting dan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penanganan yang tepat dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi fenomena sosial yang terjadi pada tempat yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pengumpulan data dilakukan secara bertahap atau periode dalam penelti adalah mengumpul data secara bertahap terhadap bahan yang dibutuhkan dalam penelitian
2. pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan cros sectional atau berupa survei sampling adalah mengadakan survei terhadap beberapa posyandu yang ada diwilayah penelitian
3. pengumpulan data dengan wawancara kepada responden adalah melakukan wawancara langsung kepada penggiat pencegahan stunting yaitu Ketua Rumah Desa Sehat, Kader Posyandu, Ketua RT, Ketua RW dan perwakilan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data prevalensi stunting balita berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 Jawa Timur menunjukkan angka 32,81%. Sedangkan Kabupaten Jember 38,31 % , masuk dalam bagian 11 Kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokus dalam penanganan stunting nasional. Sedangkan, di Kabupaten Jember ada 14 desa yang menjadi lokus penurunan angka stunting . Begitu pentingnya percepatan penanganan stunting, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengirimkan surat nomor: 400/789/321/2019 ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Jember agar memerintahkan semua Kepala Desa untuk mengadakan Rembuk Stunting. Isi surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember salah satu yang menjadi agenda terpenting, yaitu:

1. Desa agar secepatnya membentuk Rumah Desa Sehat (RDS)
2. Desa agar secepatnya mengadakan rembuk stunting
3. Desa menganggarkan kegiatan Konvergensi Stunting pada APBDes tahun 2020.

Untuk melaksanakan program penanganan konvergensi stunting pada tahun 2020, Pemerintah Desa sudah melaksanakan tahapan penanganan konvergensi stunting diantaranya sosialisasi tentang stunting, pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS), rembuk stunting serta pengalokasian anggaran Dana Desa untuk kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan pencegahan konvergensi stunting dilakukan pengorganisasian pelaku pencegahan konvergensi stunting di desa yang dilakukan oleh Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Pendamping Lokal Desa (LPD) dan Kader Pemberdayaan Manusia (KPM). Keterlibatan semua pihak sangatlah penting dalam rangka pencegahan Stunting mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Bidan Desa, Ketua RT, Ketua Rw , Guru Paud , Desa Wisma dan masyarakat desa. Rencana dan pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting diatur dan diprogram oleh Rumah Desa Sehat (RDS) yang merupakan salah satu pusat kemasyarakatan (Community Center). Karena Rumah Desa Sehat (RDS) memiliki fungsi sebagai ruang publik urusan kesehatan di Desa yang strategis untuk mendorong adanya literasi kesehatan di desa, maupun untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan di desa agar lebih terfokus pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di desa.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Desa Sehat (RDS) melibatkan Posyandu yang merupakan salah satu tempat yang paling tepat untuk melakukan pendataan sasaran dan layanan meliputi : p a) pendataan sasaran; b) jumlah dan jenis sasaran meliputi Bumil , Baduta dan anak Paud; c) kondisi rumah tangga meliputi kepemilikan jamban dan air bersih dan jaminan sosial dan kesehatan; d) pendataan pelayanan; e) kondisi posyandu; f) kondisi poskesdes; g) kondisi Paud; h) potensi desa; i) sumber air bersih; j) lahan; h)sumber daya alam; i) kebiasaan perilaku sehat masyarakat; j) pola asuh dan pola makan.

Posyandu merupakan garda terdepan dalam rangka pencegahan stunting Karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, menurut kemenkes (2011) yaitu : Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Kematian Balita (AKBA). Posyandu yang ada di wilayah RT dan RW beranggotakan lima (5) orang sangatlah berat tugasnya jika kita melihat bagaimana peranya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat . Cakupan wilayah RT yang sangat sempit sangatlah tepat jika Posyandu mulai diberdayakan dalam rangka pencegahan stunting . Pengawasan dan pemantau sangatlah mudah jika dilakukan oleh para kader posyandu yang aktif dan penuh tanggung jawab.

Dari sumber data yang dikumpulkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Desa Kencong merupakan desa yang sangat besar, sehingga dalam melaksanakan pencegahan stunting perlu keterlibatan semua pihak. Pemerintah Desa mempunyai peranan penting dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunannya. Salah satu program yang terpenting adalah pencegahan stunting yang sampai saat ini belum bisa maksimal hasilnya.

Jika di evaluasi dan dikaji ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya :

1. luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan faktor penyebab utama
2. perlunya memberdayakan posyandu dalam menangani Stunting
3. posyandu sampai saat ini tidak memiliki tempat mandiri
4. minimnya honor kader posyandu dari Pemerintah Daerah Kabupaten tidak sepadan dengan tugas dan fungsinya.

Dari empat (4) faktor penyebab merupakan kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Kencong sehingga perlu pemecahan secara bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika kita melihat luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan penyebab utama keterlambatan penanganan stunting maka solusinya adalah melakukan pemberdayaan pada posyandu dengan cara :

1. memberikan pelatihan khusus pada kader posyandu tentang penanganan stunting
2. memberikan kewenangan langsung kepada posyandu di wilayahnya agar dapat memantau dan mengawasi perkembangan kesehatan 1000 HPK secara rutin .
3. membangun tempat Posyandu yang mandiri di setiap dusun sebagai tempat untuk literasi kesehatan, pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan kepada ibu dan bayi. Posyandu mandiri harus di wujudkan karena selama ini tempat posyandu masih numpang di rumah warga sebagai tempat pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai.
4. honor atau operasional kader posyandu belum sepadan dengan tugas dan tanggung jawab , sehingga harus ada perhatian terhadap kesejahteraan kader posyandu .

SIMPULAN

Untuk mewujudkan Desa Kencong sehat dan sejahtera tidaklah mudah diperlukan adanya kerjasama TIM yang kuat . Keterlibatan semua pihak sudah dilakukan untuk memberikan dan menyajikan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. Upaya upaya yang lain harus juga dilakukan dengan mencari kekurangan dan kelemahan penting untuk segera diatasi. Pencegahan stunting di Desa Kencong sudah dilakukan secara mekanisme yang ada namun diperlukan waktu untuk menghasilkan secara maksimal karena stunting berhubungan dengan pertumbuhan 1.000 HPK.

Posyandu merupakan tempat yang tepat untuk menanganii stunting secara berkelanjutan karena sasaran 1.000 HPK dapat dipantau dan diawasi oleh kader posyandu secara rutin. Untuk mewujudkan Desa Zero stunting Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa harus memberdayakan posyandu sebagai tempat dan pusat pelayanan masyarakat di Desa. Pemerintah segera melakukan langkah langkah yang cepat dengan cara melakukan peningkatan kapasitas kader posyandu , membangun posyandu mandiri setiap dusun , meningkatkan kesejahteraan kader posyandu dengan memberikan honor yang tepat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryastami, Ni Ketut., Tarigan, Ingan. (2017) 'Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia', *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol. 45, No. 4, pp. 233 - 240
<http://dx.doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
- Hoang, V.-N., Nghiem, S. and Vu, X.-B. (2019) 'Stunting and academic achievement among Vietnamese children: new evidence from the young lives survey', *Applied Economics*, 51(18), pp. 2001–2009. doi: 10.1080/00036846.2018.1537476
- Rahmadhita, Kinanti. (2020) 'Permasalahan Stunting dan Pencegahannya', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol 11, No, 1, pp; 225-229
- Sano, Y., Routh, B. and Lanigan, J. (2019) 'Food parenting practices in rural poverty context', *Appetite*, 135, pp. 115–122. doi: 10.1016/j.appet.2018.11.024.
- Sumarmi, S. (2017) 'Tinjauan Kritis Intervensi Multi Mikronutrien Pada1000 Hari Pertama Kehidupan', *Penelitian Gizi dan Makanan*, 40(1), pp. 17–28. doi:10.22435/pgm.v40i1.6374.
- Vonaesch, P. et al. (2017) 'Factors associated with stunting in healthy children aged 5 years and less living in Bangui (RCA)', *PLoS ONE*, 12(8). doi: 10.1371/journal.pone.0182363.